



**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  
DI KECAMATAN BONEPANTAI  
(Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai  
Kabupaten Bone Bolango)**

**Arif Bobihu, Fenti Prihatini Tui, Rustam Tohopi, Juriko Abdussamad, Yacob Noho  
Nani**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo  
E-mail: arifbobihu@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. (2) Faktor-faktor yang mendukung implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat dilihat dari aspek pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berkualitas dimana laporan keuangan desa menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Sementara itu pada aspek perencanaan masih belum sesuai dengan harapan dari segenap perangkat dalam pemerintahan desa karena Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih kurang fleksibel dalam menjawab tantangan pembangunan karena proporsi pembangunan infrastruktur desa masih lebih besar dibandingkan aspek pemberdayaan masyarakat. (2) Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang menjadi pendukung, meski terdapat sistem sentralisasi perencanaan yang menjadi penghambat. Kolaborasi dan kerja sama antar aparat desa harus lebih optimal untuk baiknya hasil kerja seluruh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis sistem informasi.

**Kata Kunci: Implementasi, Sistem Keuangan Desa**

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/SJ dan MOU-16/K/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah dengan membangun sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama 'SIMDA'. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi tersebut diberikan kepada seluruh Desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya.

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Tujuan diterapkannya SISKEUDES adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola

keuangan desa serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan instruksi presiden di tahun 2017 seluruh desa sudah harus mengimplementasikan SISKEUDES 100%, dan pada tahun 2018 Presiden telah melakukan monitoring implementasi SISKEUDES langsung ke desa (<http://www.bpkp.go.id>, 2017). Sampai tanggal 31 Oktober 2017 capaian implementasi aplikasi SISKEUDES mencapai 67,55% atau 50.703 desa dari total 74.954 desa di Indonesia, sosialisasi terkait SISKEUDES sudah dilakukan kepada 65.181 desa, dan bimbingan teknis telah dilakukan kepada 61.483 desa (<http://www.bpkp.go.id/>, 2017).

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berupaya meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) termasuk Kecamatan Bonepantai. Setiap desa yang ada di Kecamatan Bonepantai berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber pendapatan desa dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan format yang ditentukan dan standar akuntansi desa yang berlaku, termasuk desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai. Berbagai laporan harus dihasilkan tepat waktu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaporan dan petanggungjawaban pemerintah desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang dimaksud prinsip tersebut bahwa semua akhir

kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan observasi peneliti lapangan, dalam pengimplementasian Sistem Keuangan Desa ini masih menemui beberapa kendala, diantaranya yaitu: kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa yang mengakibatkan pekerjaan menjadi kurang efektif dalam penerapan SISKEUDES, sehingga menimbulkan permasalahan dikalangan aparatur pemerintah desa. Disamping itu permasalahan terkait dengan pembaruan aplikasi SISKEUDES secara online dan perubahan perhitungan pemotongan pajak belum tentu dengan mudah dapat diterima oleh aparatur pemerintah desa, hal ini dikarenakan minimnya informasi yang didapati pengelola SISKEUDES karena tidak dilibatkan secara langsung ketika ada pertemuan yang membahas terkait kebijakan pengguna SISKEUDES. Hal lain juga yang dapat disimpulkan dari permasalahan ini yaitu terkait dengan pelaporan keuangan desa yang sering kali terlambat karena adanya sistem eror dalam aplikasi SISKEUDES.

Masalah lain yang ditemukan adalah penerapan aplikasi siskeudes pemerintah pusat membuat dua koneksi sesuai dengan kondisi desa yaitu Koneksi pertama via *ODBC (Open Database Connectivity)* merupakan koneksi yang secara online sehingga dapat terhubung pada pemerintah daerah dan koneksi yang kedua *Direct Acces* merupakan sistem pembacaan langsung pada file database atau *Direct Acces*. Desa Tamboo sendiri

memakai aplikasi siskeudes dengan koneksi online, namun pada kondisi tertentu masih mengalami gangguan koneksi, hal itu terjadi karena desa sendiri masih kurang memadai terhadap jaringan internet, mengalami kendala pada koneksi data base.

Berdasarkan uraian konteks penelitian dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: **“Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus Di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango).**

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kualitas Produk**

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Meter dan Horn (Agustino, 2006:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

## **B. Model Implementasi Kebijakan**

*Menurut George C. Edwards III (2004)*

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

## **C. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa

dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa (Juardi, 2018).

## **D. Konsep Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUES)**

Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemetintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017) bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sistem keuangan desa (SISKEUDES) digunakan oleh desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data (Rivan dan Maksun, 2019). Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien (Nafi'ah dan Prihatiningtias, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Dasar penetapan lokasi penelitian adalah (a) terdapatnya rangkaian permasalahan tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan

Bonepantai, Kabupaten Bonebolango yang kurang optimal, b). Lokasi penelitian merupakan tempat tinggal peneliti; c). Peneliti mengetahui, mengenal dan memahami karakteristik pegawai di lokasi penelitian; d). Peneliti mampu berinteraksi dengan seluruh tenaga aparat desa yang ada di lokasi penelitian, serta e). Peneliti memahami proses pengelolaan keuangan, karena hal ini merupakan bagian dari aktivitas keseharian peneliti ditempat kerja peneliti.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango

Hasil penelitian untuk fokus pertama

ditemukan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan cukup baik dan efektif yang dalam artian bahwa dari 4 langkah dalam pengelolaan keuangan desa, kontribusi nyata Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) desa yakni pada aspek pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berkualitas dimana laporan keuangan desa menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Sementara itu pada aspek perencanaan masih belum sesuai dengan harapan dari segenap perangkat dalam pemerintahan desa karena Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih kurang fleksibel dalam menjawab tantangan pembangunan karena proporsi pembangunan infrastruktur desa masih lebih besar dibandingkan aspek pemberdayaan masyarakat. Sementara itu untuk hasil yang lebih jelas dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

#### Temuan Peneliti atas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango

| No | Aspek Penting | Temuan   |  |
|----|---------------|--|--|
|    |               | Baik   | Masih Harus Dibenahi   |
| 1  | Perencanaan   | Perencanaan dilakukan secara rutin mengacu pada RPJMDesa             | Kurang proporsional sesuai dengan komposisi penggunaan keuangan desa |
|    |               | Penganggaran disesuaikan dengan trend tahun sebelumnya               | Masih kurang mengacu pada kebutuhan masyarakat                       |
|    |               |  | Kurang memperhatikan skala prioritas dalam pembangunan               |
| 2  | Pelaksanaan   | Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan pedoman | Adanya stigma negatif masyarakat atas penggunaan keuangan desa       |
|    |               | Mampu menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas            | Lebih mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan                  |

| No | Aspek Penting                    | Temuan  |   |
|----|----------------------------------|---|---|
|    |                                  | Baik  | Masih Harus Dibenahi  |
| 3  | Penatausahaan                    | Lebih tertatanya keuangan desa menjadi lebih rapi       | Mebutuhkan langkah kerja yang lebih teliti                                |
|    |                                  | Catatan keuangan mudah untuk dipahami dan lebih relevan | Lebih dioptimalkan dan berkesinambungan                                   |
| 4  | Pelaporan dan Pertanggungjawaban | Pelaporan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan        | Kurangnya catatan penting dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa |
|    |                                  | Menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya         | Pengawasan masyarakat yang masih minim                                    |
|    |                                  | Pengawasan dilakukan oleh instansi tingkat Kabupaten    |   |
|    |                                  | Dukungan Pemerintah Kecamatan yang baik                 |   |

Sumber: Observasi Peneliti, Agustus 2022

## B. Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango

Hasil penelitian untuk fokus kedua ditemukan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang menjadi pendukung. Hasil analisis untuk setiap sub fokus faktor-faktor yang menentukan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dijabarkan sebagai berikut ini:

### Faktor komunikasi dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango

Hasil analisis mengenai sub fokus faktor

komunikasi dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango ditemukan bahwa komunikasi menjadi faktor penting karena koordinasi dan berbagai konsolidasi dalam penetapan tujuan desa dalam proses penganggaran akan berdampak nyata dalam berbagai tata kelola keuangan di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Penggunaan aplikasi siskeudes ini tidak instant membuat laporan pertanggungjawaban menjadi ideal karena komunikasi yang terjalin berbagai pihak akan mendorong baiknya pengelolaan keuangan dengan aplikasi Siskeudes di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

### Faktor sumber daya dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango

Hasil analisis mengenai sub fokus faktor sumber daya dalam pengimplementasian sistem

keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango ditemukan bahwa faktor sumber daya akan memberi dampak solutif bagi pemerintah desa untuk mampu menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan efektif. Adanya pemahaman, kompetensi dan sikap kerja dari aparat desa serta dukungan berbagai fasilitas sarana prasarana untuk sistem tersebut akan berkontribusi nyata dalam meningkatkan baiknya pengelolaan keuangan desa di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

#### **Faktor disposisi dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango**

Hasil analisis mengenai sub fokus faktor disposisi dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango ditemukan bahwa aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) menjadi sebuah sistem yang mudah untuk digunakan dan memberi kebermanfaatan yang sesuai dengan tujuan awal pemerintah dalam membuatnya. Dengan adanya faktor aplikasi atau teknis penerapan yang bisa diimplementasikan pada seluruh lini pengelolaan keuangan desa maka akan membuat capaian penting dalam pencapaian *Good Governance* dalam locus pemerintahan desa di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, terlebih lagi jika pegawai memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan pekerjaan untuk pengelolaan keuangan desa.

#### **Faktor struktur birokrasi dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango**

Hasil analisis mengenai sub fokus faktor struktur birokrasi dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango ditemukan bahwa adanya faktor organisasi membuat penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) lebih mudah untuk dilakukan, terlebih lagi jika pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk melakukan pengembangan kapasitas dari pegawai agar mampu menggunakan sistem aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan baik. Dukungan struktur birokrasi memberikan dampak positif dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan Siskeudes dimana dengan adanya dukungan organisasi lainnya maka kegiatan/program dan berbagai harapan pemerintah bisa tercapai. Pemerintah Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango harus senantiasa membangun sebuah kerja sama dengan pemerintah Kabupaten, pusat dan pemerintah Provinsi agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik.

#### **SIMPULAN**

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan cukup baik dan efektif yang dalam artian bahwa dari 4 langkah dalam pengelolaan keuangan desa, kontribusi nyata Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) desa yakni pada aspek pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan

yang lebih berkualitas dimana laporan keuangan desa menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Sementara itu pada aspek perencanaan masih belum sesuai dengan harapan dari segenap perangkat dalam pemerintahan desa karena Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih kurang fleksibel dalam menjawab tantangan pembangunan karena proporsi pembangunan infrastruktur desa masih lebih besar dibandingkan aspek pemberdayaan masyarakat.

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang menjadi pendukung, meski masih terdapat pula sistem sentralisasi perencanaan yang menjadi penghambat. Aspek pemahaman dan komitmen aparat desa yang baik namun terdapat pula komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang masih minim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango untuk optimalnya berbagai pendukung pengelolaan keuangan desa. Kemudian terdapat sistem aplikasi yang dibuat sesederhana mungkin dan mencakup seluruh proses pengelolaan desa namun sangat bergantung pada kerja sama antara operator desa, sehingga inovasi pada birokrasi desa harus lebih optimal untuk baiknya hasil kerja seluruh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis sistem informasi.

## SARAN

Pentingnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango

melakukan kegiatan penguatan pada SDM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang lebih rutin agar pada aparat desa bisa mengoperasikan sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan baik dalam rangka untuk mencapai grade terbaik dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Bagi pemerintah Kecamatan Bonepantai untuk lebih intens dalam hal pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam upaya untuk mencegah berbagai tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang selama ini sering terjadi. Penggunaan aplikasi harus lebih relevan dengan kecanggihan teknologi dan juga mampu menjawab dan mengcover seluruh aktivitas pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Texas A & M University
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Khasanaton Nafi'ah, Nur. (2018). *Implementasi Dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Oktasari. (2015). *Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum*



*Penyelenggaraan Publik Di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Journal Ilmu Pemerintahan, 3 (2), 2015: 1339-1353*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nomor 900/6271/SJ dan MOU-16/K/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Bone Bolango (PERBUP) Nomor 75 Tahun 2021, Tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2021.